

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah sebagai kekurangan kebutuhan barang dan jasa atau jasa yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak. Dalam penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa kebutuhan individu itu berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi individu tersebut. Terkadang orang merasa miskin karena barang dan jasa yang dikonsumsi dianggap tidak memadai karena standarnya adalah orang yang lebih kaya atau berpenghasilan lebih banyak dari orang tersebut.

Kemiskinan dan kerawanan pangan di Indonesia merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah dari waktu ke waktu. Menurut Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional (2017), kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memerlukan pengelolaan dan program yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program kebijakan guna meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap pangan dan mengentaskan kemiskinan.

Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Banyuwangi terletak diujung Pulau Jawa dan merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur. Jumlah penduduk miskin antara satu Kabupaten/Kota dengan lainnya sangat bervariasi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Jawa Timur maka bisa dilihat kondisi kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	2021	No	Kabupaten/Kota	2021
1	Malang	276.58	21	Bondowoso	115.18
2	Jember	257.09	22	Blitar	112.62
3	Sampang	237.23	23	Lumajang	105.25
4	Sumenep	224.73	24	Ponoroggo	89.94
5	Probolinggo	223.32	25	Situbondo	86.95
6	Bangkalan	215.97	26	Trenggalek	84.89
7	Tuban	192.58	27	Pacitan	84.19
8	Kediri	184.49	28	Madiun	81.61
9	Lamongan	166.82	29	Tulungagung	78.59
10	Bojonegoro	166.52	30	Magetan	67.75
11	Gresik	166.35	31	Kota Malang	40.62
12	Pasuruan	159.78	32	Kota Kediri	22.55
13	Kota Surabaya	152.49	33	Kota Probolinggo	17.91
14	Sidoarjo	137.15	34	Kota Pasuruan	13.97
15	Pamekasan	137.12	35	Kota Blitar	11.33
16	Banyuwangi	130.93	36	Kota Madiun	9.06
17	Ngawi	130.81	37	Kota Batu	8.63
18	Jombang	127.30	38	Kota Mojokerto	8.37
19	Nganjuk	125.53	Jawa Timur		4572.73
20	Mojokerto	120.54			

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Menurut tabel 1.1 angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi menempati urutan ke enam belas tertinggi di Jawa Timur. Sedangkan jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi menjadi bagian dari salah satu lumbung pangan di provinsi Jawa Timur. Secara umum, kemiskinan di

Kabupaten Banyuwangi di picu oleh kondisi perekonomian nasional. Lemahnya sumber daya manusia(SDM) kian memperparah angka kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 angka kemiskinan di Banyuwangi mencapai 8.07% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 130.93 jiwa. Pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki kewajiban yang berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan.

Tabel 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi, 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2017	138,54	8,64
2018	125,50	7,80
2019	121,37	7,52
2020	130,37	8,06
2021	130,93	8,07

Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi, 2017-2021 dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017-2021 jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin berfluktuif atau turn naiknya kondisi tersebut. Hal ini dikarenakan Kabupaten Banyuwangi ini memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat urbanisasi dari desa. Banyuwangi menjadi salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk miskin diatas seratus ribu jiwa. Jumlahnya merangkak naik di tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi covid-19 yang melanda Indonesia.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak- anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD

1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Untuk mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial. Peran pemerintah sangat diperlukan mengingat kebijakan dan peraturan yang dianggap menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah kemiskinan juga erat kaitannya dengan tingkat pendidikan, kesehatan dan pangan. Kemiskinan telah menghambat jutaan anak tidak bisa melanjutkan pendidikan atau bahkan ada yang tidak bersekolah, masyarakat miskin juga sulit dalam membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang mengarah pada kekerasan dan kejahatan.

Upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat kepada keluarga miskin untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. PKH membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin (dampak konsumsi langsung) dengan berinvestasi pada generasi mendatang melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Kombinasi bantuan jangka pendek dan jangka panjang ini merupakan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan para penerima PKH.

PKH dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang diawasi secara ketat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

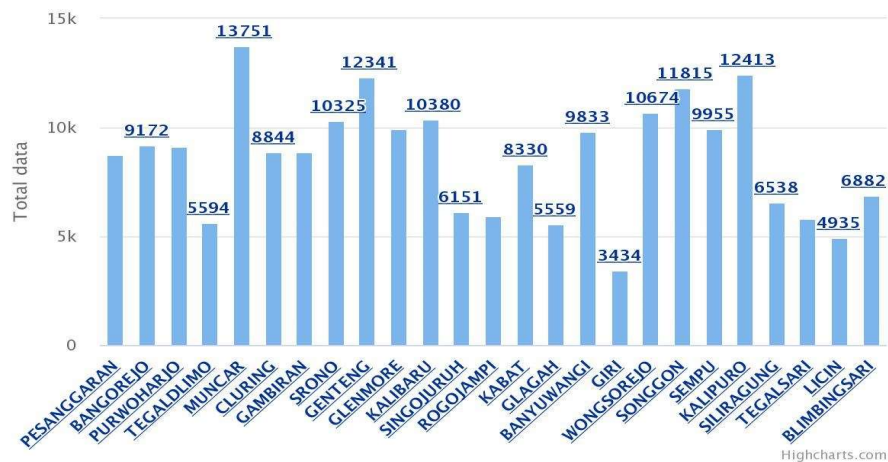
Program ini dimulai pada tahun 2007 sebagai program rintisan yang disertai unsur penelitian di dalamnya. Pada awal kebijakan, pelaksanaan program percontohan ini berjalan lambat, terlihat pada terbatasnya cakupan program (dalam hal jumlah keluarga maupun wilayah penerima manfaat). Sejak tahun 2010, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor Wakil Presiden mulai mendorong perluasan cakupan PKH yang berimbas pada pelaksanaan program yang lebih efektif dan berdampak positif bagi penduduk miskin. Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Sebagai imbalannya KPM diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. PKH merupakan suatu program bansos yang mempunyai syarat tertentu yaitu bumil, anak balita, anak dalam masa pendidikan yang terkategori sangat miskin untuk berbagai layanan kesehatan dan berbagai fasilitas layanan pendidikan. Bansos PKH diberikan selama 3 bulan sekali. Dimana bansos ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang membutuhkan. PKH merupakan program yang diberikan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sehingga mengurangi jumlah kemiskinan yang dialami disuatu wilayah. (Singkoh dalam Nadhifah dan Mustofa, 2021)

Program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang disalurkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mengurangi beban masyarakat miskin, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Diantaranya Kabupaten Banyuwangi dengan data penerima PKH ditahun 2021 sebagai berikut :

Data PKH

Klik untuk melihat perdesa



Sumber : Unit Gawat Darurat Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi, 2021

Gambar 1.1 Data PKH Kabupaten Banyuwangi 2021

Dapat dilihat dari gambar 1.1 yang merupakan gambar penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021. Kecamatan Muncar merupakan kecamatan yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) terbanyak sebesar 13753 dan Program Keluarga Harapan (PKH) paling rendah sebanyak 3434 yaitu pada Kecamatan Giri.

Bantuan Pangan Non Tunai ini adalah konversi dari beras sejahtera atau Rastra bantuan ini akan disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagai syarat mendapatkan BNPT para keluarga penerima harus memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. Penyaluran Bantuan

Pangan secara Non Tunai dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 pada beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai. Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan.

Data BPNT

Klik untuk melihat perdesa



Sumber : Unit Gawat Darurat Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi, 2021

Gambar 1.2 Data BPNT Kabupaten Banyuwangi 2021

Dapat dilihat pada gambar 1.2 yang merupakan grafik penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021. Kecamatan Muncar merupakan kecamatan yang mendapatkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terbanyak sebesar 27263 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) paling rendah sebesar 7202 pada Kecamatan Giri.

Kabupaten Banyuwangi adalah satu dari empat kota di Jawa Timur yang menjadi percontohan penyaluran BPNT yang merupakan salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyaluran program bantuan adalah ketepatan sasaran penerima program, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Dengan demikian dapat meningkatkan ketahanan pangan bagi penerima program sekaligus bentuk upaya perlindungan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Haqiqi & Subroto (2021) secara parsial pendapatan dan konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan keluarga. Secara simultan pendapatan dan konsumsi rumah tangga secara bersama-sama mempengaruhi kesejahteraan keluarga sebesar 85.8 persen sedangkan sisanya 14.2 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang tidak diteliti.

Menurut Gultom, Kindangen & Kawung (2021) Program Keluarga Harapan berpengaruh positif terhadap kemiskinan akan tetapi tidak signifikan secara statistik Artinya, apabila Program Keluarga Harapan naik maka tingkat kemiskinan akan naik *Ceteris Paribus*. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif antara Program Keluarga Harapan terhadap kemiskinan. Akan tetapi hasil ini tidak signifikan secara statistik.

Menurut Muharir (2022) Hasil analisis regresi menyatakan bahwa variabel Bantuan PKH sebagian berpengaruh secara signifikan terhadap Pola Konsumsi Kelompok penerima manfaat dan Hasil analisis regresi menyatakan bahwa

variabel Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagian berpengaruh secara signifikan terhadap Pola Konsumsi Kelompok penerima manfaat. PKH dan BPNT merupakan bantuan bersyarat dari pemerintah maka KPM PKH harus dapat mengoptimalkan dengan baik bantuan PKH tersebut untuk keperluan kebutuhan pokoknya.

Research gap pada penelitian ini yaitu adanya pembaruan pada variabel, daerah, tahun, dan teknik analisis yang digunakan. Beberapa variabel penelitian ini tidak sama persis dengan variabel yang sudah dilakukan, dalam penelitian ini menggunakan variabel berupa Perempuan Bekerja. Adanya pembaruan daerah dan tahun yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya belum ada penelitian yang meneliti di daerah Banyuwangi tentang bantuan sosial. Kemudian, beberapa penelitian menggunakan metode pengumpulan data dan analisis yang berbeda, sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bantuan sosial (BPNT dan PKH) berpengaruh terhadap “pengeluaran pangan” (sebagai *proxy* kesejahteraan masyarakat miskin)?
2. Bagaimana Jumlah Anggota Keluarga berpengaruh terhadap “pengeluaran pangan” (sebagai *proxy* kesejahteraan masyarakat miskin)?
3. Bagaimana Perempuan Bekerja berpengaruh terhadap “pengeluaran pangan” (sebagai *proxy* kesejahteraan masyarakat miskin)?
4. Bagaimana Pendapatan berpengaruh terhadap “pengeluaran pangan” (sebagai *proxy* kesejahteraan masyarakat miskin)?
5. Bagaimana bantuan sosial (BPNT dan PKH), Jumlah anggota keluarga, perempuan bekerja dan pendapatan berpengaruh terhadap pengeluaran

konsumsi dalam “pengeluaran pangan” (sebagai *proxy* kesejahteraan masyarakat miskin)?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh bantuan sosial (BPNT dan PKH) terhadap “pengeluaran pangan” (sebagai *proxy* kesejahteraan masyarakat miskin).
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Anggota Keluarga terhadap “pengeluaran pangan” (sebagai *proxy* kesejahteraan masyarakat miskin).
3. Untuk mengetahui pengaruh Perempuan Bekerja terhadap “pengeluaran pangan” (sebagai *proxy* kesejahteraan masyarakat miskin).
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan terhadap “pengeluaran pangan” (sebagai *proxy* kesejahteraan masyarakat miskin).
5. Untuk mengetahui bantuan sosial (BPNT dan PKH), Jumlah anggota keluarga, perempuan bekerja dan pendapatan berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi dalam “pengeluaran pangan” (sebagai *proxy* kesejahteraan masyarakat miskin).

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna bagi peneliti selanjutnya. Penelitian bisa dijadikan bahan kajian maupun rujukan bagi peneliti lain. Penelitian memberikan wawasan pengajaran baru bagi mahasiswa yang berkaitan dengan Dampak Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi dan menambah manfaat bagi program studi fakultas atau mahasiswa, juga sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan Dampak Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat untuk masa yang akan datang, dan menambah bahan bacaan bagi para mahasiswa di Universitas Trunojoyo Madura.

b. Bagi Peneliti

Penelitian tersebut bisa menjadi media pengembangan diri dan pengimplementasian yang hanya di dapatkan pada masa perkuliahan. Ilmu yang di dapat di implementasikan secara nyata pada saat penelitian. Melatih analisa mahasiswa untuk memperoleh gambaran tentang Dampak Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

c. Bagi Pihak Lain

Dengan penelitian yang dilakukan peneliti, diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak lain yang membutuhkan rujukan dan kajian mengenai variabel-variabel dalam penelitiannya.